



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : MOHAMAD MUSLIHUDDIN
- 2. Jabatan : KEPALA BIRO
- 3. NHK : 173143

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.800.000.000

- 1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
- 2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
- 3. Tanah Seluas 2833 m2 di KAB / KOTA CILACAP, WARISAN Rp. 1.100.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/70 m2 di KAB / KOTA CILACAP, WARISAN Rp. 700.000.000
- 5. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/96 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 29.000.000

- 1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
- 2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 527.300.350

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 4.356.300.350

III. HUTANG

Rp. 373.354.194

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.982.946.156



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.